

Hubungan Strategi Pemerintah Daerah terhadap Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang

The Relationship between Local Government Strategies and Traditional Market Arrangements in Rengasdengklok District, Karawang Regency

Neri Fajarwati & Roziana Lahmini¹

Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur No 112-116 Bandung 40132
Telp. 022.2504119 Fax. 022.2506577

(Diterima 04/01/21; disetujui 19/05/21)

Abstract

The government's interventions in structuring traditional markets in Rengasdengklok District, Karawang Regency had not been effective, resulting in traffic jams. The government was in the process of constructing a new market building to move the traders to a new location. There was no proper building for traders, furthermore existing traders were hard to be arranged properly. As a result, the traders filled the main road of Rengasdengklok and left traces of rubbish on the side of the road. This study uses the main component theory of government strategy (X) which consists of 5 sub-variables, namely purposes, environment, direction, action, and learning. In addition, the researchers use structuring theory (Y) which consists of 6 sub-variables, namely man, material, machines, method, money, and market. Quantitative approach is employed by using literature study, questionnaires, observation, and documentation as the instruments. The population in this study are traders, amounting to 1,314 people and a sample of 93 people taken purposively. The data analysis techniques that are used are the Pearson product-moment, hypothesis testing and the coefficient of determination. The result shows that the respondents' responses about the local government strategy is 65.6%, which is categorized as strong. Moreover, the result in the arrangement of traditional markets is 79.0%, which is also categorized as strong. The contribution of relationship between local government strategy and traditional market arrangement is scored 23.8% which according to the interpretation guideline of coefficient of determination is categorized as low. This happens because there is no proper building for traders to sell. Then the remaining 76.2% is caused by other factors that were not examined by the researcher.

Keywords: strategy; government; management Strategy; management of traditional market

Abstrak

Upaya pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang belum efektif yang mengakibatkan kemacetan. Pemerintah sedang melakukan proses pembangunan gedung baru pasar untuk memindahkan para pedagang ke tempat baru. Masalah yang terjadi dalam penataan pasar tradisional ini adalah belum adanya gedung yang layak untuk pedagang, serta pedagang yang susah ditata dengan baik. Akibatnya para pedagang memenuhi jalan

¹ Email: nerifajar@gmail.com

utama Rengasdengklok dan meninggalkan bekas sisa-sisa sampah di pinggir jalan. Peneliti menggunakan teori komponen pokok strategi pemerintahan (X) yang terdiri dari 5 sub variabel yaitu *purposes, environment, direction, action, dan learning*. Selain itu peneliti menggunakan teori penataan (Y) yang terdiri dari 6 sub variabel yaitu *man, material, machines, method, money, dan market*. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, angket, observasi, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang yang berjumlah 1.314 orang dan sampel berjumlah 93 orang diambil secara *purposive*. Teknik analisis data yang digunakan yakni *pearson product moment*, uji hipotesis dan koefisien determinan. Hasil penelitian menunjukkan tanggapan responden tentang strategi pemerintah daerah sebesar 65,6%, berdasarkan kriteria persentase skor jawaban responden dikategorikan kuat. Adapun hasil dalam penataan pasar tradisional sebesar 79,0% hal ini berdasarkan kriteria skor jawaban responden dikategorikan kuat. Hubungan strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisional dapat dilihat kontribusi hubungan sebesar 23,8% berdasarkan pedoman interpretasi koefisien determinasi tergolong rendah. Hal ini terjadi karena belum adanya bangunan yang layak bagi para pedagang untuk berjualan. Kemudian, sisanya sebesar 76,2% disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Kata Kunci: strategi, pemerintah, strategi penataan, penataan pasar tradisional

1. PENDAHULUAN

Mengelola pemerintahan pada umumnya diperlukan manajemen supaya lebih mudah dalam pencapaian tujuan. Hal ini karena semakin kompleks masyarakat yang diatur, maka akan semakin kompleks juga permasalahannya. Untuk itu, diperlukan manajemen publik sebagai suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia. Pemerintahan memiliki fungsi yaitu pelayanan, regulasi/pengaturan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan untuk setiap warga negara. Pemerintah daerah dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengelola manajemen, pemerintah butuh strategi yang paling tepat untuk mencapai visi, misi, dan sasaran-sasaran pemerintah.

Strategi dalam pemerintahan sangatlah dibutuhkan untuk penyelesaian masalah dan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sudah diterapkan oleh pemerintah, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas pada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional, maupun secara kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Aktivitas ekonomi masyarakat sekarang ini berkembang pesat seiring kemajuan zaman dan pola pikir manusia yang futuris, sebagaimana tempat aktivitas itu sendiri yaitu pasar. Saat ini pasar tradisional masih menjadi wadah utama penjualan produk-produk berskala ekonomi rakyat seperti hasil panen para petani, nelayan, pedagang barang kerajinan tangan dan produk industri rumah tangga (industri rakyat). Pasar tradisional

merupakan sandaran hidup bagi banyak orang dan terjadi interaksi sosial yang sangat kental yaitu adanya sistem penjualan langsung (dengan tawar-menawar). Pasar tradisional juga hanya berupa bangunan sederhana seperti kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar.

Pasar berperan penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan, yakni untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat, seperti sandang dan pangan. Selain itu, pasar juga bermanfaat bagi masyarakat, di antaranya untuk memenuhi unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, politis dan lain-lain. Pasar juga merupakan salah satu lembaga penggerak dinamika kehidupan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Pasar tradisional juga memiliki beberapa kelemahan, seperti kondisi pasar yang kurang teratur, faktor keamanan yang lemah, risiko pengurangan timbangan terhadap barang yang akan dibeli, penuh sesak, dan sejumlah alasan lainnya. Pasar tradisional umumnya berlokasi di tempat terbuka dan menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga. Pasar tradisional secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasar tradisional sebagai bagian dari usaha sektor informal yang dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja di masyarakat, terutama bagi sebagian masyarakat yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki. Para pedagang di pasar tradisional biasanya memperdagangkan bahan-bahan dari hasil/usaha sendiri seperti pertanian, persawahan atau hasil/usaha nelayan. Penataan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pasar tradisional tetap ada, seiring berkembangnya pasar modern saat ini.

Dewasa ini, pasar berkembang menjadi salah satu penggerak utama kegiatan ekonomi masyarakat dan kegiatan ekonomi masyarakat tidak akan berjalan tanpa adanya pasar. Orang tidak akan memproduksi barang dan jasa jika tidak ada pasar sebagai tempat dia menjual barang dan jasanya tersebut. Sebaliknya, orang tidak akan mengonsumsi barang dan jasa jika tidak ada pasar yang menyediakannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa pasar merupakan tempat pengalokasian sumber daya ekonomi dalam masyarakat.

Penataan berasal dari kata dasar “tata”, yang berarti aturan. Penataan merupakan hal, cara, atau hasil pekerjaan menata. Menata adalah mengatur, menyusun sesuai dengan aturan dan sistem. Penataan berarti mengatur atau menyusun tempat sebagai simbol yang menjembatani kebutuhan manusia dan kedudukan masa lalu dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Sedangkan sebagai sebuah proses penataan dapat langsung diarahkan pada pengertian manajemen yang berasal dari kata “*to manage*” yang artinya mengatur atau menata.

Menurut Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Toko Modern, dan Pusat Perbelanjaan Bagian Pertama Pasal 2 menyatakan penataan pasar tradisional harus memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
2. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan

- c. Menyediakan fasilitas untuk menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
3. Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, 2007).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat diketahui bahwa pendirian *minimarket* harus mempertimbangkan kepadatan penduduk, perkembangan pemukiman baru, arus lalu lintas, ketersediaan infrastruktur, keberadaan pasar tradisional, dan warung/toko di wilayah sekitar. Pendirian *minimarket* juga harus mempertimbangkan area parkir yang cukup, kemitraan dengan UMKM, luas lantai penjualan kurang dari 400 meter persegi, dan harus memiliki izin usaha toko modern.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bagian Kedua Pasal 17 yang berbunyi:

1. Dalam rangka penataan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan diutamakan letak lokasi pendirian dimaksud berada pada sistem jaringan jalan primer dan sekunder;
 - b. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan menengah di wilayah yang bersangkutan;
 - c. Memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pasar rakyat, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar rakyat.

Pasar tradisional yang berada di Kecamatan Rengasdengklok ini merupakan pasar tradisional terbesar di Kabupaten Karawang. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang sudah menyiapkan bangunan atau gedung untuk para pedagang di pasar, tetapi masih dalam proses pembangunan. Para pedagang di pasar ini awalnya berjualan di pelataran pasar Kecamatan Rengasdengklok yang awalnya sudah ada gedung untuk para pedagang. Namun, gedung-gedung dan kios-kios lama, sudah tidak layak digunakan karena bangunan sudah rusak dan tidak terurus. Pasar Rengasdengklok yang baru ini sedang dalam proses pembangunan. Rencana awal, berada di Kecamatan Rengasdengklok, kemudian berpindah ke Kecamatan Kutawaluya, yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Para pedagang hanya memiliki lapak saja, tidak dalam bentuk kios atau los, melainkan hanya berjualan di pinggir jalan raya sekitaran Kecamatan Rengasdengklok, dengan lapak yang tidak permanen (dapat dilepas pasang oleh pedagang). Para pedagang yang awalnya mempunyai tempat berjualan di dalam pasar, lebih memilih meninggalkan lapak di dalam pasar dengan alasan berjualan di pinggir jalan jauh lebih lebih strategis dan dapat memudahkan pembeli, sehingga keuntungan yang didapat lebih besar dibandingkan jika berjualan di dalam pasar.



Gambar 1. Kondisi Pedagang Kaki Lima dan Parkir Sembarangan di Pasar Kecamatan Rengasdengklok
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020

Gambar 1 diambil berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan oleh peneliti. Belum adanya kesamaan persepsi antara para pedagang Pasar Rengasdengklok dan pedagang kaki lima mengenai harga yang ditawarkan pemerintah dan pengembang, menjadi penyebab timbulnya masalah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok. Dalam kesepakatan pembangunan pasar ini, pemerintah dan pengembang meminta para pedagang untuk membayar sewa gedung terlebih dahulu, tanpa adanya sosialisasi mengenai pembangunan gedung pasar yang baru. Para pedagang tidak mau membayar sewa gedung yang harganya dirasa terlalu tinggi. Permasalahan itulah yang membuat pembangunan pasar jadi terhambat. Para pedagang kaki lima yang memenuhi jalan utama, mengakibatkan kemacetan di pagi hari tidak dapat dihindari. Permasalahan pedagang kaki lima ditimbulkan karena para pedagang tidak memiliki tempat yang legal untuk berjualan. Pedagang kaki lima dikelola oleh pihak ketiga, sehingga dalam hal pengelolaan dan penataan ini kurang diperhatikan. Oleh sebab itu, sebagian pedagang kaki lima meninggalkan kios dalam pasar dan lebih memilih berjualan di pinggir jalan dengan alasan berjualan di luar pasar lebih laris dibandingkan jika berjualan di dalam pasar.



Gambar 2. Kondisi Pelataran Pasar Rengasdengklok
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020

Masalah lain yang terlihat pada Gambar 2 di atas, yaitu adanya perilaku parkir sembarangan oleh pemilik kendaraan roda dua dan roda empat di pelataran jalan pasar yang mengakibatkan kemacetan. Permasalahan ini ditimbulkan karena tidak tersedianya

lahan parkir kendaraan. Para pedagang dan pembeli hanya memarkir kendaraannya di pelataran jalan karena tidak ada area khusus parkir. Padahal, penyediaan area parkir telah dilakukan berdasarkan kerja sama pengelola pasar dengan pihak lain. Serta adanya tukang parkir yang setiap hari memungut biaya parkir ribuan sepeda motor. Namun, tidak jelas ke mana masuknya hasil uang parkir yang dipungut itu.

Selain itu, juga terdapat persoalan sampah yang menumpuk di pinggir-pinggir jalan. Masalah sampah tersebut kurang diperhatikan oleh pengelola pasar karena pada kenyataannya fasilitas yang diberikan setiap hari hanya ada dua mobil pengangkut sampah. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah sampah yang ada. Tempat pembuangan sampah yang jaraknya jauh dari daerah pasar, mengakibatkan tidak semua sampah dapat terangkut. Belum adanya tempat sampah di sekitaran pasar, membuat sampah-sampah yang tidak terangkut tersebut menumpuk di pinggir jalan. Persoalan sampah ini menjadi kurang diperhatikan karena kewenangan urusan sampah sudah dilimpahkan pada pihak ketiga. Seluruh hasil retribusi pun sudah dipegang oleh pihak ketiga. Saat musim hujan, area tersebut tergenang banjir yang akhirnya menyisakan lumpur dan sampah di mana-mana yang membuat lingkungan kurang nyaman dan tidak sehat.

Peneliti sebelumnya menyebutkan bahwa fungsi pasar dapat menimbulkan ketidakseimbangan ruang aktivitas dagang, ketika terjadi perpindahan dan pemusatan aktivitas pada satu pusat perdagangan di luar area pasar yaitu di pinggiran jalan. Kondisi ini menyebabkan adanya ruang-ruang yang tidak dimanfaatkan pada lokasi pasar. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat menyebabkan keberadaan pasar menjadi penting. Pasar tradisional masih menunjukkan kondisi yang kurang tertata, antara lain jumlah pedagang yang semakin meningkat, keterbatasan lahan, dan pengelolaan pasar yang buruk. Kondisi keterbatasan lahan dapat dilihat dengan adanya eksploitasi ruang pasar untuk berdagang yang diindikasikan dengan penggunaan lorong dan koridor pasar sebagai tempat jual beli sehingga menyebabkan pasar tidak tertata dengan rapi. Selain itu, jika dibandingkan dengan pasar modern, pasar tradisional memiliki kekurangan yaitu lokasi yang menyebabkan kemacetan, kumuh, kurang tertata karena terbatasnya ruang lapak, kurangnya tempat sampah, kondisi ini yang menyebabkan pengunjung merasa kurang nyaman (Qoriah, 2014). Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Persamaan penelitian di atas adalah kesamaan fokus pada strategi penataan pasar serta persamaan lainnya adalah lokus yang diteliti di antaranya banyak terdapat pedagang kaki lima yang berjualan di pelataran maupun di jalan pasar mengakibatkan kondisi pasar tidak tertata sehingga menghadapi masalah yang sama.

Selain itu, penelitian sebelumnya meneliti tentang Perencanaan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pasar Tombatu di Kabupaten Minahasa Tenggara (Poluan et al., 2017). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang ada di pasar Tombatu seperti penataan para pedagang yang memakai lahan parkir untuk berjualan sehingga sering kali terjadi kemacetan di depan pasar akibatnya mengganggu pengguna jalan lain. Adapun masalah di dalam pasar apabila hujan, sering kali terjadi banjir karena tidak memiliki saluran atau selokan, akibatnya pasar menjadi becek, licin, dan tampak kumuh karena sampah berserakan setelah banjir surut. Hal ini membuat proses jual beli menjadi terganggu dan tidak nyaman. Begitu juga sampah-sampah yang ada di depan pasar sering kali hanya dibiarkan sehingga mengakibatkan pasar itu terkesan kotor dan tidak sehat.

Perencanaan penataan pemerintah mengacu pada Peraturan Daerah Pasar dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian di atas adalah dengan terbatasnya alokasi anggaran sehingga menghambat perencanaan penataan Pasar Tombatu. Bertambahnya jumlah pedagang dan sifat egosentris pedagang yang terlalu tinggi serta kurangnya tenaga operasional yang mengatur pasar, baik penataan pedagang maupun dalam kebersihan pasar (Poluan et al., 2017).

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut. Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu penelitian di atas berfokus pada penataan pasar. Persamaan lainnya yaitu penelitian di atas berfokus pada pedagang kaki lima, dan sisa-sisa sampah dari pedagang yang berjualan. Perbedaannya yaitu teori yang digunakan oleh peneliti di atas mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 sedangkan peneliti menggunakan Teori Geoff Mulgan. Perbedaan lainnya terdapat perbedaan rumusan masalah yaitu dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang ada di pasar Tombatu seperti penataan para pedagang yang memakai lahan parkir untuk berjualan sehingga sering kali terjadi kemacetan di depan pasar akibatnya mengganggu pengguna jalan lain. Sedangkan rumusan masalah yang melatarbelakangi penelitian saat ini adalah penataan para pedagang yang belum memiliki tempat layak untuk berjualan. Metode yang digunakan peneliti di atas menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif.

Fokus pada artikel ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan kurangnya strategi pemerintah daerah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Dalam hal inilah peneliti tertarik dan memilih judul yaitu Hubungan Strategi Pemerintah Daerah terhadap Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.

2. TINJAUAN TEORITIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

2. 1. Kebijakan Publik

Kebijakan dapat diartikan sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya untuk mencari solusi dari masalah yang ada dengan sarana tertentu dan dalam tahapan waktu tertentu (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Kebijakan publik adalah produk politik, sehingga unsur-unsur politik ikut mewarnai kebijakan yang dihasilkan. Hal ini menjadi persoalan jika warna politik itu tidak proporsional, misalnya didominasi oleh warna dan kepentingan tertentu atau hasil 'dagang sapi', sehingga muncul warna dominan di pasar tertentu dan warna dominan lain pada pasar yang lain (Rusli, 2013). Selain itu ahli lain mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik Administrasi Publik. Sebagai salah satu unsur penting dalam Administrasi Publik, Kebijakan Publik dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi otak pada tubuh manusia karena melalui instrumen ini, segala aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, plus pihak swasta, dan masyarakat (Mulyadi, D, 2016).

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat dibutuhkan karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. 2. Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan disebut manajemen publik merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik

organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak membuat orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. Istianto dalam bukunya Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik yang dikutip oleh Herry Suharyadi dan Mohamad Aji Insani mengatakan bahwa manajemen pemerintahan diartikan sebagai cara bagaimana mengimplementasikan kebijakan publik secara organisasional. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih fokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan (Suharyadi & Insani, 2016).

Menurut pendapat ahli di atas dalam menerapkan manajemen sektor publik diharapkan dapat menjadi instansi reaktif dalam menghadapi situasi dan kondisi. Dapat mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal, dapat mengubah instansi untuk berorientasi pada masa depan, dapat menjadikan instansi lebih fleksibel dan transparan, serta dapat menjadikan instansi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. 3. Strategi

Makna atau cara dalam konsep strategi telah diberikan oleh banyak ahli dengan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan definisi-definisi strategi yang berbeda pula. Strategi sangat dibutuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah diterapkan dan untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif dan menjelaskan bagaimana cara mencapai semua tujuan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya (Rangkuti, 2013). Berdasarkan pendapat tersebut, strategi sangat berkaitan dengan pencapaian visi dan misi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Para ahli lain mengatakan bahwa strategi sebagai suatu rencana yang berskala besar dan berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sasaran-sasaran (Pearce & Robinson, 2009). Pengertian strategi tersebut menyatakan bahwa strategi adalah rencana yang dapat digunakan dalam jangka waktu lama.

Geoff Mulgan lebih lengkap menjelaskan bahwa terdapat lima komponen pokok strategi pemerintahan, yaitu:

1. Mengetahui dan menentukan tujuan (*purposes*);
2. Menganalisis lingkungan (*environments*) internal maupun eksternal;
3. Menentukan arah (*direction*) capaian strategi;
4. Menentukan aksi/tindakan (*action*) yang hendak dilakukan;
5. Menganalisis pembelajaran (*learning*) yang didapat (Mulgan, 2009).

Komponen pokok strategi pemerintahan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, mengetahui dan menentukan tujuan (*purposes*). Dalam dimensi ini dijelaskan antara lain agar dapat memahami mengapa tujuan tersebut menjadi suatu hal yang penting dan bernilai. Kemudian apa yang membuat tujuan tersebut menjadi sebuah kebutuhan untuk dilaksanakan oleh lembaga tersebut dan harapan seperti apa yang dimiliki dalam pelaksanaan tujuan tersebut.

Kedua, menganalisis lingkungan (*environments*) baik internal maupun eksternal organisasi. Artinya dalam konteks tindakan perlu dianalisis ancaman dan kesempatan seperti apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Kemudian menganalisis sejauh mana kapasitas organisasi pelaksana strategi tersebut memiliki daya untuk merespons.

Ketiga, menentukan arah (*direction*) pencapaian strategi, antara lain menentukan prioritas strategi apa saja yang hendak dibuat dan target apa saja yang hendak dicapai dalam waktu tertentu, yang sudah disepakati bersama.

Keempat, menentukan aksi/tindakan (*action*) yang hendak dilakukan. Di tahap ini berisi antara lain strategi apa yang akan digunakan dalam mencapai tujuan tersebut, kebijakan seperti apa yang sudah dikeluarkan selama mencapai tujuan tersebut, dan implementasi seperti apa yang sudah dilakukan selama ini.

Kelima, menganalisis pembelajaran (*learning*) yang didapat, antara lain berisi umpan balik dari strategi yang sudah dilakukan, yang datang dari segi politik maupun publik dan bagaimana cara menyikapinya. Dan terakhir, bagaimana evaluasi yang hendak dilakukan dalam implementasi strategi yang sudah dilakukan selama ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Dasar pemikiran untuk variabel *independent*/bebas (variabel x), peneliti mendeskripsikan usulan penelitian mengenai definisi atau faktor-faktor yang berkaitan dengan strategi.

Berdasarkan konsep Strategi yang dikemukakan Geoff Mulgan, maka peneliti memilih lima komponen pokok strategi pemerintahan yaitu terdiri dari:

1. Mengetahui dan menentukan tujuan (*purposes*),
2. Menganalisis lingkungan (*environments*) internal maupun eksternal,
3. Menentukan arah (*direction*) capaian strategi,
4. Menentukan aksi/tindakan (*action*) yang hendak dilakukan,
5. Menganalisis pembelajaran (*learning*) yang didapat (Mulgan, 2009).

Sedangkan untuk variable Y (variabel terikat), Peneliti memilih Teori Penataan George R. Terry. Teori tersebut menyebutkan bahwa penataan dilihat dari enam unsur yaitu sumber daya manusia, bahan baku, mesin, metode, uang, dan pasar (Terry, 1993). Konsep tersebut menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam penataan, yaitu:

Pertama, pemerintah daerah adalah faktor yang sangat penting dan menentukan berjalannya suatu penataan. Pemerintah yang membuat perencanaan dan sekaligus melaksanakan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah membuat rencana dan proses kerja untuk penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Tanpa adanya pengelolaan dari pemerintah, para pedagang yang ada di pasar tradisional tersebut tidak akan dapat mengelola dan menata tempat berjualannya.

Kedua, untuk memproduksi suatu barang, pemerintah membutuhkan bahan baku. Ketersediaan bahan baku sangat penting dalam proses penataan, baik berupa bahan setengah jadi (*raw material*) maupun bahan jadi. Untuk bisa mengatur penataan pasar yang baik sesuai dengan tujuan. Selain dibutuhkan manusia yang ahli di bidangnya, pemerintah juga harus menggunakan bahan atau materi yang baik dan berkualitas.

Ketiga, mesin digunakan dalam proses penataan. Mesin dan peralatan kerja lainnya sangat dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan pemerintah, menjadi lebih cepat dan efisien, serta berperan dalam meningkatkan hasil dan tujuan yang akan dicapai. Dengan perkembangan teknologi, penggunaan mesin semakin canggih dan modern, sehingga

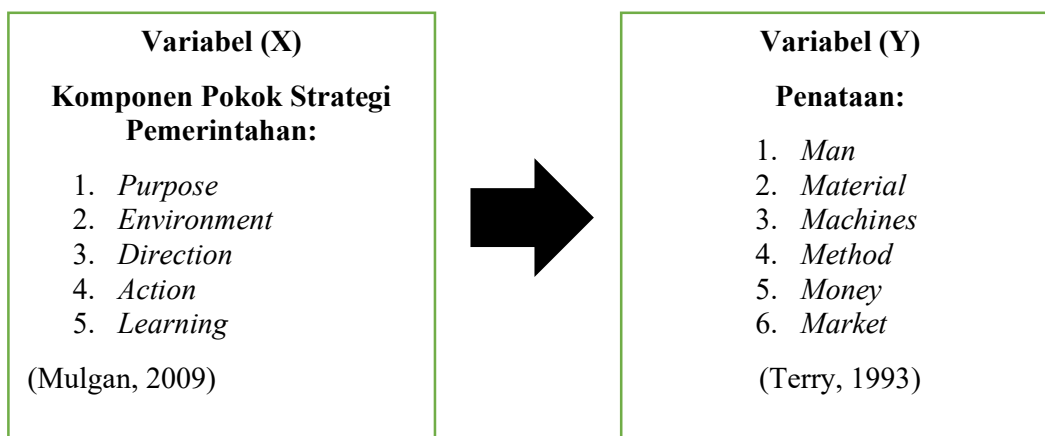
proses penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok menjadi lebih efisien dan efektif dengan hasil lebih cepat.

Keempat, untuk menjalankan aktivitasnya, penataan membutuhkan biaya, baik untuk pembelian dan perawatan alat-alat, pembelian bahan baku/material, pembayaran gaji tenaga kerja, dan lain sebagainya. Pengelolaan uang yang baik akan berpengaruh terhadap sukses tidaknya sebuah penataan yang dilakukan. Oleh karena itu, pengelolaan uang harus dilakukan secara rasional agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Kelima, dalam penataan diperlukan adanya beberapa metode untuk menentukan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan. Serangkaian prosedur dan instruksi pemerintah ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai, fasilitas yang tersedia, waktu, uang, dan kegiatan bisnis. Metode-metode tersebut ditetapkan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan berperan untuk meningkatkan penggunaan semua sumber daya serta faktor-faktor produksi, sehingga semua pekerjaan bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Keenam, untuk memasarkan hasil penataan dengan baik, pemerintah wajib memahami kemauan dan kebutuhan para pedagang di pasar tradisional Kecamatan Rengasdengklok. Pemasaran sangat penting untuk kelangsungan proses dari pemerintah itu sendiri. Proses penataan tidak akan berhasil jika tidak diminati oleh para pedagang. Artinya pasar sangat penting untuk dikuasai demi kelangsungan proses penataan pemerintah.

Selanjutnya untuk mempermudah peneliti dalam memahami pokok-pokok pikiran dari setiap teori yang digunakan, maka dibuatlah kerangka pemikiran yang didasarkan atas pola pikir peneliti dalam menyikapi strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan model kerangka pemikiran pada Gambar 3 di atas, tanda panah yang mengarah pada kotak bagian kanan, berarti menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah berpengaruh terhadap penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.

3.1. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Untuk hipotesisnya sebagai berikut:

H0: Tidak terdapat hubungan antara strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.

H1: Terdapat hubungan antara strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.

3.2. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur sejauh mana kebenaran dan ketepatan suatu alat ukur dalam pengujian suatu penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengorelasikan skor jawaban responden per *item* pernyataan dari jumlah total jawaban responden pada keseluruhan pernyataan. Teknik korelasi yang digunakan untuk menguji kebenaran tiap pernyataan pada penelitian ini menggunakan *korelasi bivariate Pearson* karena jumlah sampel > 30 orang.

Peneliti menentukan validitas menggunakan program SPSS 25 untuk tiap *item* pernyataan pada kuesioner yang telah dikumpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menentukan Nilai r Tabel

Peneliti menentukan r tabel dengan rumus $df = N - k = 93 - 2 = 91$, artinya bahwa jumlah sampel (N) dikurangi jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian (k) adalah 91 responden. Peneliti juga menggunakan standar taraf signifikansi dengan dua arah yaitu 0.05. Sehingga sesuai dengan ketentuan r tabel, maka dengan nilai N = 91 dan sig. 5% menghasilkan nilai r kritis sebesar 0.3.

2. Uji Validitas bertujuan untuk mengetahui validitas angket.

Jika nilai $r_{hitung} > \text{nilai } r_{tabel}$, maka angket valid atau jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka angket tidak valid. Peneliti menggunakan SPSS 25 untuk mencari nilai r_{hitung} pada kuesioner. Berikut merupakan hasil uji validitas dari tiap *item* pernyataan kuesioner pada kedua variabel.

3.3. Uji Validitas Strategi (Variabel X)

Peneliti menguji validitas menggunakan koefisien korelasi Pearson dengan hasil olah data SPSS ditampilkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Strategi (X)

No	r hitung	r kritis	Keterangan
1	0.776	0.3	Valid
2	0.696	0.3	Valid
3	0.585	0.3	Valid
4	0.739	0.3	Valid
5	0.675	0.3	Valid
6	0.690	0.3	Valid
7	0.336	0.3	Valid
8	0.580	0.3	Valid
9	0.785	0.3	Valid
10	0.875	0.3	Valid
11	0.326	0.3	Valid
12	0.567	0.3	Valid

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel 1 diketahui nilai r hitung untuk variabel X1 diperoleh angka sebesar 0.776 lebih besar dari nilai r tabel 0.3 menunjukkan bahwa angket untuk variabel X1 dianggap

valid. Demikian juga untuk variabel X yang lainnya, menunjukkan semua nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel. Dengan demikian semua angket untuk variabel X dianggap valid atau validitas terpenuhi.

3. 4. Uji Validitas Penataan (Variabel Y)

Peneliti menguji validitas menggunakan koefisien korelasi Pearson dengan 13 pernyataan dari alat ukur variabel Y (Penataan), dan hasil olah data SPSS pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Penataan (Y)

No	r hitung	r kritis	Keterangan
1	0.300	0.3	Valid
2	0.759	0.3	Valid
3	0.305	0.3	Valid
4	0.319	0.3	Valid
5	0.544	0.3	Valid
6	0.639	0.3	Valid
7	0.534	0.3	Valid
8	0.386	0.3	Valid
9	0.780	0.3	Valid
10	0.584	0.3	Valid
11	0.555	0.3	Valid
12	0.523	0.3	Valid
13	0.534	0.3	Valid

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua *item* pernyataan yang berkaitan dengan Penataan (variabel Y) valid untuk digunakan dalam proses pengolahan analisis data, karena semua hasil korelasi tiap *item* pernyataan menghasilkan r hitung $>$ r tabel sehingga validitas terpenuhi. Sehingga semua *item* pernyataan pada kuesioner mengenai Hubungan Strategi Pemerintah Daerah terhadap Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang dinyatakan valid karena semua koefisien validitas $>$ r table 0.240 dan dapat digunakan untuk analisis data selanjutnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1. Analisa Hasil Uji Reliabilitas

Uji realibilitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya dalam ketepatan dan konsistensi suatu kejadian dalam organisasi maupun kelompok individu. Pengujian dilakukan menggunakan metode *cronbach alpha* untuk mengetahui konsistensi (reliabel) angket dan menggunakan pengujian instrumen SPSS 25.

Cronbach alpha adalah koefisien alpha yang dikembangkan oleh Cronbach tahun 1951 sebagai ukuran umum dari konsistensi internal skala multi *item* dan menyatakan angket dikatakan reliabel jika koefisien Cronbranch Alpha lebih besar atau sama dengan 0,70 (Zulganef, 2006). Dasar Pengambilan keputusan *Cronbach Alpha*:

1. Jika nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,70, maka konsisten (*reliabel*).

2. Jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,70, maka tidak konsisten (tidak *reliabel*).

Tabel 3. *Cronbach's Alpha* Strategi dan Penataan

Reliability Statistics		
<i>Cronbach's Alpha</i> Strategi	N of Items	
.760		12
<i>Cronbach's Alpha</i> Penataan	N of Items	
.749		13

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2020

Keterangan:

Berdasarkan kriteria pada tabel 3 di atas, bahwa variabel Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang (X) memperoleh 0.760 alpha positif yang lebih besar dari 0,70 dan Penataan Pasar Tradisional (Y) memperoleh 0.749 alpha positif yang lebih besar dari 0,70 Dengan demikian semua butir pernyataan pada angket penelitian dikatakan reliabel.

4. 2. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada para pedagang pasar, peneliti memperoleh data karakteristik yang terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan status ataupun cara berdagang.

Responden penelitian ini adalah pedagang di pasar yang berjumlah 93 responden. Berdasarkan data hasil angket, diketahui bahwa responden yang terpilih tidak dibatasi pada jenis kelamin, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Karakteristik Responden

Komponen	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin Pedagang		
Laki-Laki	50	54%
Perempuan	43	46%
Usia Responden		
20-30	25	27%
31-40	38	41%
>41	30	32%
Pendidikan Terakhir Responden		
SD	60	64%
SMP	23	25%
SMA/Sederajat	10	11%
Cara Berdagang		
Pedagang Yang Memiliki Kios	50	50%
Pedagang blm Memiliki Kios	18	18%
Pedagang Kaki Lima	25	23%
Jumlah Keseluruhan	93	100%

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2020

Berdasarkan tabel 4. di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 54% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 46% lainnya berjenis kelamin perempuan. Hal ini mengingat bahwa para pedagang mayoritas laki-laki karena dapat dilihat bahwa tanggung jawab laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, faktor lainnya yaitu karena di pasar Kecamatan Rengasdengklok berjualannya selama 24 jam sehingga didominasi oleh laki-laki. Data usia pedagang berusia 20-30 tahun sebesar 27% yang berjumlah 25 orang, usia 31-40 tahun sebesar 41% yaitu berjumlah 38 orang dan yang berusia lebih dari 41 tahun sebesar 32% atau berjumlah 30 orang.

Sulitnya mendapat pekerjaan dan keadaan ekonomi yang tidak menentu, membuat pedagang yang mayoritas usia 31-40 tahun lebih memilih berjualan di pasar untuk mendapatkan penghasilan demi menunjang kehidupan keluarganya. Sebanyak 60%, responden merupakan lulusan SD. Sedangkan 23% responden lulusan SMP, kemudian 10% responden lulusan SMA. Rata-rata tingkat pendidikan terakhir responden yang berjualan di pasar yaitu lulusan Sekolah Dasar, karena berjualan tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, masyarakat lulusan Sekolah Dasar lebih memilih berjualan di pasar dibandingkan mencari pekerjaan di luar yang memerlukan tingkat pendidikan lebih tinggi.

4. 3. Rekapitulasi Strategi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil olah data, peneliti merangkum rekapitulasi keseluruhan tanggapan responden mengenai strategi pemerintah daerah, sebagai berikut:

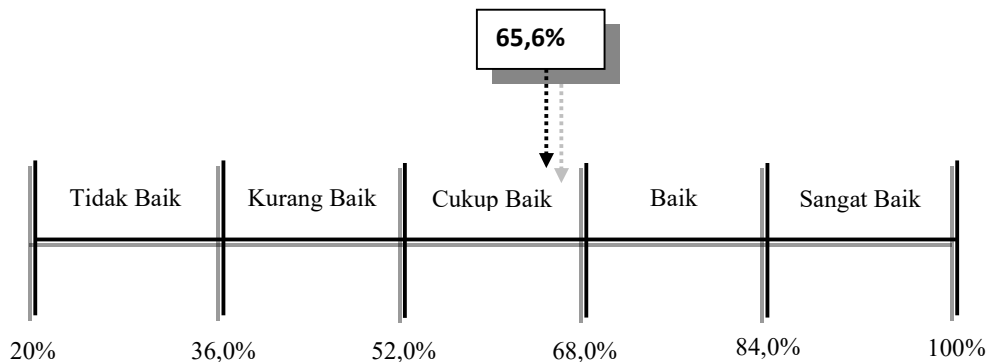
Tabel 5. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Strategi Pemerintah Daerah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
Purposes (Tujuan)					
1	Tujuan visi misi	270	465	58,1%	Cukup
2	Arah pencapaian	292	465	62,8%	Kuat
3	Sasaran/target	290	465	62,4%	Kuat
Environment (Lingkungan)					
4	Kapasitas pemerintah	298	465	64,1%	Kuat
5	Keberhasilan	358	465	77,0%	Kuat
Direction (Arah)					
6	Capaian target	340	465	73,1%	Kuat
7	Prioritas strategi	338	465	72,7%	Kuat
Action (Tindakan)					
8	Sikap tingkah laku	298	465	64,1%	Kuat
9	Kebijakan pemerintah	282	465	60,6%	Kuat
10	Implementasi peraturan daerah	285	465	61,3%	Kuat
Learning (Pembelajaran)					
11	Cara Menyikapi	334	465	71,8%	Kuat
12	Mengevaluasi Kesalahan	276	465	59,4%	Cukup
Total		3.661	5.580	65,6%	Kuat

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2020

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan-tanggapan pada tabel 5 di atas, diketahui bahwa nilai persentase keseluruhan kategori variabel strategi sebesar 65,6% dan dikategorikan kuat. Beberapa variabel masuk dalam kategori kuat seperti salah satu contohnya pada komponen *environment*. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam penataan pasar melalui pembangunan gedung baru.

Dengan adanya gedung baru, para pedagang dan pembeli akan merasa lebih nyaman. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pemerintah daerah dinilai baik. Sedangkan pada subkomponen tujuan visi misi dan evaluasi masuk dalam kategori cukup. Hal ini dibuktikan dengan belum terwujudnya perdagangan yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat, walaupun saat ini pada tahap pembangunan pasar. Namun, yang terjadi di lapangan sebagian pedagang merasa keberatan karena biaya pembangunan gedung baru pasar sepenuhnya dititkberatkan kepada para pedagang dengan harga yang cukup mahal. Jika disajikan dalam bentuk gambar garis kontinum, nilai persentase skor tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Hasil Kalkulasi
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020

Hasil kalkulasi pada Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa dari variabel Strategi Pemerintah Daerah (X) termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan hasil analisis variabel Strategi Pemerintah daerah (X) terlihat bahwa kelima sub-variabel yang digunakan mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Hal ini tentunya didukung oleh hasil akumulasi skor pada sub-variabel *purposes*, *environment*, *direction*, *action* dan, *learning* yang menunjukkan bahwa variabel ini tergolong baik. Dalam memahami variabel Strategi Pemerintah Daerah, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kelima sub-variabel tersebut saling bersinggungan dan saling memengaruhi antara yang lain.

4. 4. Rekapitulasi Penataan Pasar Tradisional

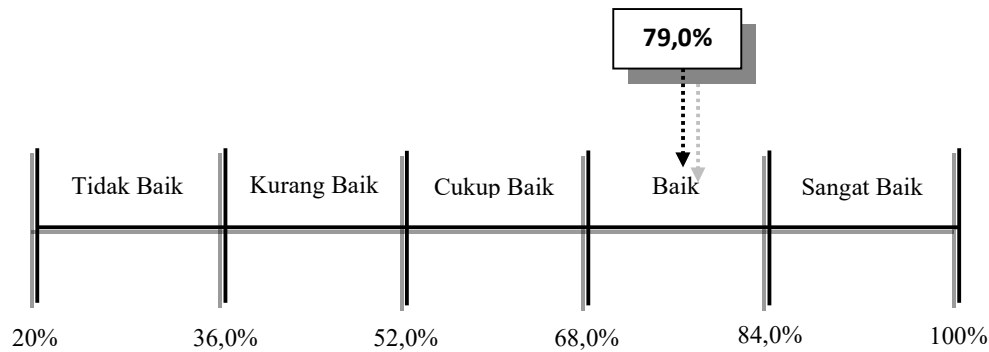
Berdasarkan hasil olah data, peneliti merangkum rekapitulasi keseluruhan tanggapan responden mengenai penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang sebagai berikut:

Tabel 6. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
<i>Man</i>					
1	Pelaksana Penataan	305	465	65,6%	Kuat
2	Mengatur dan Menjalankan	336	465	72,3%	Kuat
<i>Machines</i>					
3	Alat dan Mesin	383	465	82,4%	Sangat Kuat
4	Penggunaan Mesin Dapat Meminimalisasi Waktu	387	465	83,2%	Sangat Kuat
<i>Material</i>					
5	Bahan Baku	389	465	83,7%	Sangat Kuat
6	Bahan dan Peralatan	399	465	85,8%	Sangat Kuat
<i>Method</i>					
7	Standar Operasional Prosedur	390	465	83,9%	Sangat Kuat
8	Instruksi Pemerintah	372	465	80,0%	Kuat
<i>Money</i>					
9	Biaya	367	465	78,9%	Kuat
10	Membayar Pekerja	380	465	81,7%	Sangat Kuat
11	Pengelolaan Uang	377	465	81,1%	Sangat Kuat
<i>Market</i>					
12	Memahami Kemauan dan Kebutuhan	319	465	68,6%	Kuat
13	Minat Para Pedagang	372	465	80,0%	Kuat
Total		4.776	6.045	79,0%	Kuat

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan-tanggapan pada tabel 6 di atas, diketahui bahwa nilai persentase keseluruhan diperoleh sebesar 79,0% dan dikategorikan kuat. Salah satu contohnya pada komponen *man* dan *market* masuk dalam kategori kuat, hal ini ditunjukkan dengan pemerintah bekerja semaksimal mungkin dalam penataan pasar karena banyaknya masalah yang harus dibenahi. Masalah tersebut seperti gedung yang sedang dibangun dan pedagang yang sulit diatur. Penataan pasar akan berhasil jika bentuk kerja sama yang terwujud antara dinas, pengelola pasar, dan pedagang berjalan cukup baik. Sedangkan pada beberapa komponen lain masuk dalam kategori sangat kuat contohnya pada komponen *machines* dan *materials*. Hal ini ditunjukkan dalam melaksanakan pembangunan gedung baru pasar, pemerintah membutuhkan bahan yang berkualitas serta alat atau mesin dan juga tempat yang luas untuk memudahkan penataan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang dinilai baik. Jika disajikan dalam bentuk gambar garis kontinum, nilai persentase skor tersebut ditampilkan pada Gambar 5 sebagai berikut:



Gambar 5. Hasil Analisis Variabel Kesejahteraan

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan hasil analisis variabel kesejahteraan (Y) terlihat bahwa keenam sub-variabel yang digunakan mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap penataan pasar tradisional. Hal ini tentunya didukung oleh hasil akumulasi skor pada sub-variabel *man*, *material*, *machines*, *method*, *money*, dan *market* yang menunjukkan bahwa variabel ini tergolong baik. Hasil ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok sudah berjalan cukup optimal.

4. 5. Hubungan Strategi Pemerintah Daerah terhadap Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang

Pada pembahasan ini, peneliti menjelaskan bagaimana hasil penelitian yang telah diuji. Selanjutnya dianalisis kembali serta dilihat bagaimana hubungan yang terjadi pada variabel strategi terhadap penataan yang dikorelasikan dengan teori, kerangka pemikiran dan studi pustaka yang telah peneliti jelaskan sebelumnya.

4.5.1. Analisis Korelasi

Peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan (linier) antara variabel strategi dan variabel penataan. Tujuan analisis korelasi ini adalah untuk melihat hubungan antara Pengaruh Strategi Pemerintah Daerah terhadap Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Teknik analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi Pearson *product moment*. Pengujian dilakukan berdasarkan nilai alpha (α) yaitu 1% atau 0,01. Dalam analisis korelasi, peneliti menyebut bahwa kedua variabel yang dikorelasikan (dihubungkan) bersifat independen antara satu dengan yang lain, maksudnya adalah masing-masing variabel berdiri sendiri dan tidak tergantung satu sama lain. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Korelasi

		strategi	penataan
strategi	Pearson Correlation	1	.238*
	Sig. (2-tailed)		.022
	N	93	93

penataan	Pearson	.238*	1
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)	.022	
	N	93	93

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel 7 di atas, diketahui bahwa nilai korelasi yang diperoleh antara strategi pemerintah daerah dengan penataan pasar tradisional adalah sebesar 0,238. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Semakin baik strategi pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula tingkat penataan pasar tradisional. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 0.238 termasuk ke dalam kategori rendah, berada dalam kelas interval antara 0,200 – 0,399. Jika dikonsultasikan dengan tabel interpretasi koefisien korelasi maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah daerah mempunyai hubungan di antara keduanya, namun pengaruhnya rendah terhadap penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.

4.5.2. Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui apakah strategi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap penataan pasar tradisional, maka dilakukan pengujian hipotesis asosiatif. Hipotesis dalam penelitian adalah:

H0: Tidak terdapat hubungan antara strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.

H1: Terdapat hubungan antara strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.

Berikut rumusan hipotesis asosiatif:

Tolak H_0 : Jika $t_{\text{hitung}} \geq t_{\text{tabel}}$, maka tolak H_0 yang artinya strategi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.

Terima H_0 : Jika $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$, maka terima H_0 yang artinya strategi pemerintah daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Hasil pengujian ditampilkan dengan rumus t_{hitung} berikut ini:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

$$t = 0,238 \sqrt{\frac{91}{1-0,056644}}$$

$$t = 2,338$$

Berikut adalah hasil rumusan pengujian hipotesis strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis

No	Variabel	R	t-hitung	t-tabel	Kesimpulan
1	X – Y	0,238	2,338	1,986	Signifikan

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2020

Berdasarkan *output* pada tabel 8 di atas, diperoleh angka koefisien korelasi Pearson (R) dengan nilai 0,238. Dengan demikian, berdasarkan tingkat kekuatan antara variabel strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisional memiliki korelasi hubungan rendah. Dikategorikan kuat karena hasil olah data menunjukkan pada rentan hubungan antara 0,200 – 0,399. Berdasarkan arah (jenis) hubungan antar variabel memperoleh angka koefisien korelasi bernilai positif, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa semakin ditingkatkan strategi pemerintah daerah, maka penataan pasar tradisional akan meningkat pula. Selain itu, berdasarkan hubungan signifikan, diketahui nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) sebesar $0.000 < 0.05$ maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel strategi terhadap penataan.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 2.338. Nilai ini lebih besar dari nilai t-kritis yang diperoleh sebesar 0,3. Maka dengan demikian H_0 ditolak, dan H_a diterima, yang artinya ada hubungan, searah dan signifikan antara strategi pemerintah daerah (X) dengan penataan pasar tradisional (Y).

4.5.3. Analisis Hubungan (Koefisien Determinasi)

Koefisien Determinasi (KD) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (R) atau disebut juga sebagai *R-Square*. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar hubungan yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat dalam bentuk persentase.

Untuk menentukan rumus perhitungan koefisien determinasi (Kd) dapat dilihat sebagai berikut:

$$Kd = (r)^2 \times 100 \%$$

$$Kd = 0,238 \times 100 \%$$

$$Kd = 23,8\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa nilai koefisien determinasi (KD) yang diperoleh sebesar 23,8%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok berada pada kategori lemah, sedangkan sisanya sebesar 76,2% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. Besarnya hubungan strategi pemerintah daerah berbanding tipis dengan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hubungan strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang terlihat dari hasil penelitian dengan analisis deskriptif yakni terkait *purposes*, *environment*, *direction*, *action*, dan *learning*. Hal ini tentunya dapat memberikan gambaran bagaimana strategi pemerintah daerah berhubungan terhadap penataan pasar tradisional. Peran pemerintah daerah merupakan tolok ukur keberhasilan suatu penataan pasar tradisional. Artinya apabila pemerintah daerah tidak melaksanakan secara optimal, maka tentunya berimplikasi terhadap ketidakpuasan pedagang.

Dari pemahaman di atas, relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini yakni terkait hubungan strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan

bahwa terlihat pentingnya hubungan strategi pemerintah daerah dengan penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.

5. PENUTUP

Strategi pemerintah daerah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok diperoleh sebesar 65,6%. Beberapa variabel masuk dalam kategori kuat seperti salah satu contohnya pada komponen *environment*. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam penataan pasar melalui pembangunan gedung baru. Dengan adanya gedung baru, para pedagang dan pembeli akan merasa lebih nyaman.

Penataan pasar tradisional diperoleh nilai sebesar 79,0% berdasarkan persentase skor jawaban responden menunjukkan nilai kuat. Salah satu contohnya pada komponen *man* dan *market*, masuk dalam kategori kuat. Hal ini ditunjukkan dengan pemerintah bekerja semaksimal mungkin dalam penataan pasar karena banyaknya masalah yang harus dibenahi. Masalah tersebut seperti gedung yang sedang dibangun dan pedagang yang sulit diatur.

Penataan pasar akan berhasil jika bentuk kerja sama yang terwujud antara dinas, pengelola pasar, dan pedagang berjalan cukup baik. Sedangkan pada beberapa komponen lain masuk dalam kategori sangat kuat, contohnya pada komponen *machines* dan *materials*. Hal ini ditunjukkan dalam melaksanakan pembangunan gedung baru pasar. Pemerintah membutuhkan bahan yang berkualitas serta alat ataupun mesin dan juga tempat yang luas untuk memudahkan penataan. Terdapat hubungan, namun persentase yang dilihat dari pedoman interpretasi koefisien determinasi berada di kategori rendah. Pengaruhnya sebesar 23,8%, sisanya sebesar 76,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mencoba memberikan saran yang dapat menjadi masukan atau kontribusi bagi Instansi:

1. Untuk mengoptimalkan strategi pemerintah daerah, dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam hal waktu pembangunan gedung baru pasar. Dalam hal ini belum diketahui seberapa lama target jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok.
2. Untuk meningkatkan penataan pasar tradisional, diharapkan pemerintah lebih tegas dalam memberi sanksi kepada pedagang yang sulit diatur. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kebersihan pasar dan memberi fasilitas angkutan sampah lebih banyak.
3. Untuk meningkatkan strategi pemerintah dan penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, pemerintah dapat melangsungkan pembangunan Gedung baru yang nyaman dan bersih untuk para pedagang berjualan dengan harga sewa gedung yang terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulgan, G. (2009). *The Art Of Public Strategy: Mobilizing Power And Knowledge For The Common Good*. Oxford university press.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2009). *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Salemba Empat.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, (2007).
- Poluan, I., Gosal, R., & Undap, G. (2017). *Perencanaan Pemerintah Daerah Dalam Penataan*

- Pasar Tombatu di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Qoriah, C. G. (2014). Model Penataan Pasar Tradisional Berdasarkan Karakteristik Kegiatan, Fasilitas dan Utilitas :Studi Kasus Pasar Tanjung Di Kabupaten Jember. *Penelitian Dosen Pemula*, 1-21.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 2-12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rangkuti, F. (2013). *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyadi, H., & Insani, M. A. (2016). Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Di Kota Bandung Tahun 2015. *CosmoGov*, 2(2), 239. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10014>
- Terry, G. R. (1993). *Prinsip-prinsip manajemen*. Bumi Aksara.
- Zulganef. (2006). *Pemodelan Persamaan Struktural & Aplikasinya Menggunakan Amos 5*. Penerbit Pustaka.